

PERUBAHAN RENCANA KERJA



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024**

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Daftar isi

BAB I PENDAHULUANI-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Maksud dan Tujuan I-2

1.3. Landasan Hukum I-3

1.4. Sistematika Penulisan I-6

BAB II EVALUASI RENJA II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja II-1

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD II-13

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... II-1

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah II-1

BAB IV PENUTUP III-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Perubahan Renja Perangkat Daerah berperan penting untuk mendorong kinerja suatu Perangkat Daerah dalam mengoptimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya. Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II, kondisi keuangan daerah serta kondisi lain yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan :

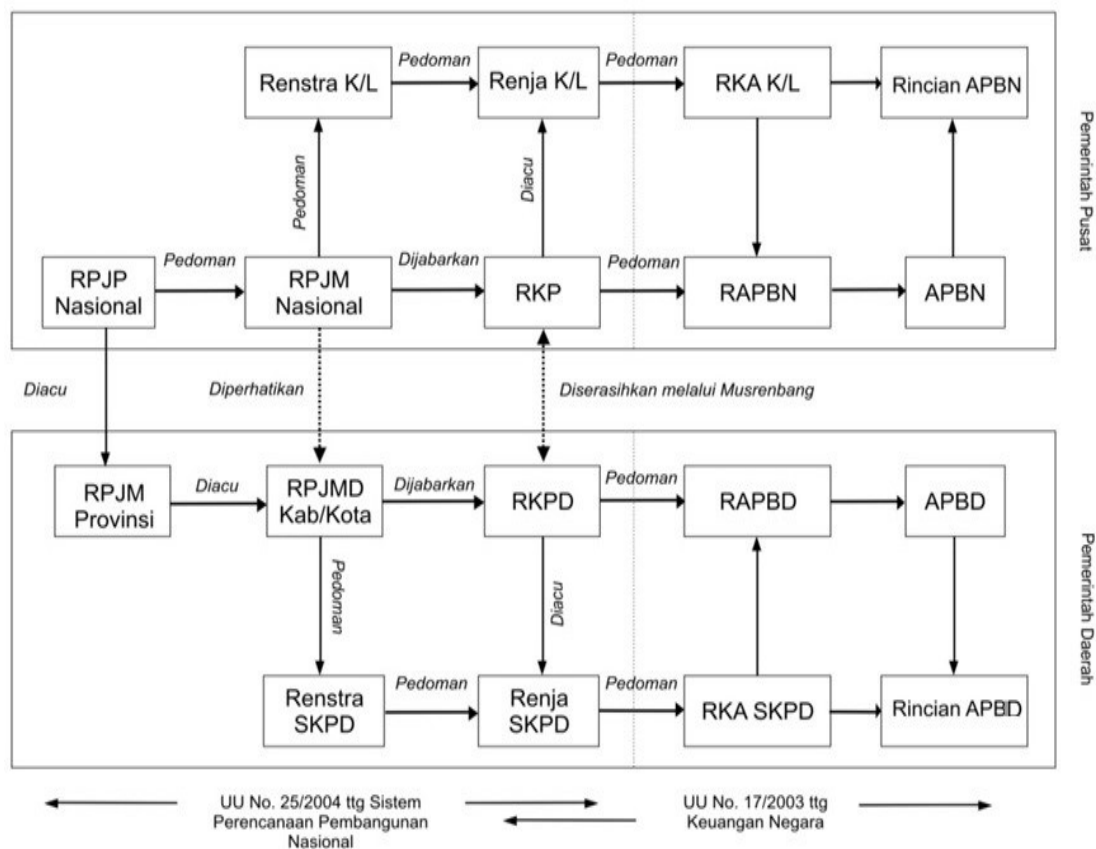
- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. Urusan wajib yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 menjadi bahan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan selanjutnya disempurnakan menjadi Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah. Program yang diprioritaskan dan menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Perekonomian dan Pembangunan
- c. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



Gambar 1.1
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 adalah:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan pembangunan yang terpadu, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan dan potensi pembangunan kota sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024.
2. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis Perangkat Daerah jangka pendek (1 tahun) .
3. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah .

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 adalah:

1. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan Badan Pendapatan Daerah melalui target kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2024;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun;



3. Memberikan acuan bagi Badan Pendapatan Daerah sebagai Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan serta sub kegiatan pada sisa tahun anggaran 2024.

1.3. Landasan Hukum

Ketentuan yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Renja Bapenda Tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka



- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 15) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
 - 16) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3);
 - 17) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);
 - 18) Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 40);



- 19) Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 90);
- 20) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 42).
- 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 22) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Surabaya nomor 69 tahun 2023 tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 60);
- 23) Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 100.3.3.3/201/436.1.2/2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2024.

1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya



Gambar 1.2

Bagan Organisasi Badan Pendapatan Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.



BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024

Bab ini berisi mengenai evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota menggunakan evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah kabupaten/kota. Hasil evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan Triwulan I.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan rincian rencana program dan kegiatan perangkat daerah (mencakup lokasi, target, dan pagu indikatif) saat sebelum dan setelah mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II 2024

Pelaksanaan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 dilaksanakan dalam 3 program meliputi :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya terealisasi sebesar 100%.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan terealisasi sebesar 117.48 %
 - b. Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar terealisasi sebesar 325.17 %.
 - c. Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir terealisasi sebesar 34.51 %.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan terealisasi sebesar 101.69%.



Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																					
5.02		Keuangan																					
5.02.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			111,32 5,211		47,385, 586		47,354, 427		9,195 ,505		22,730, 124		-		-		31,925, 629		79,311, 215		71,24%
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94 %		95.37 %		92 %		95.59 %		95.59 %		-		-		95.59 %		95.59 %		101.69%	
5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			105,07 6,481				37,689, 515		8,114 ,624		19,839, 955		-		-		27,954, 579		27,954, 579		26.60%
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		100 %		100 %		100.00 %	



Perubahan Rencana Kerja
Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2024

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
						dan Tunjangan ASN																						
5.02.01.2.02.0001						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9,120,103			37.689.515		8.114.624		19.839.955		-		-		27.954.579		27.954.579		306,52 %			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A		N/A		121 Orang/bulan		103 Orang/bulan		119 Orang/bulan		-		-		119 Orang/bulan		119 Orang/bulan		N/A			
5.02.01.2.04						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		302,277			234,286		38,371		108,307		-		-		146,678		146,678		48.52%			
						Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		-		-		1 Dokumen		3 Dokumen		150.00 %			



Perubahan Rencana Kerja
Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2024

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
5.02.01.2.04.0002						Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			302,277				234.286		38.371		108.307		-		-			146.678		146.678		48,52%	
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		N/A		N/A		2 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		-		-		1 Dokumen		1 Dokumen		N/A		
5.02.01.2.08						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5,946,453				9,430,626		1,042,511		2,781,861		-		-			3,824,372		3,824,372		64.31%	
							Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran		100 %		100 %		100 %		100 %				-		-		100 %		100 %		100.00 %		



Perubahan Rencana Kerja
Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2024

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
5.02.01.2.08.0004						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5,702,468				5.895.223		815.341		2.124.809		-		-		2.940.149		2.940.149		51,56%		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-		-		6 Laporan		6 Laporan		N/A			
5.02.01.2.08.0003						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1,678,872				3.535.403		227.171		657.052		-		-		884.223		884.223		52,67%		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-		-		6 Laporan		6 Laporan		N/A			
5.02.02						Program Pengelolaan Keuangan Daerah			376,596		371,674		366,137		73,321		172,329		-		-		245,651		617,325		163,92 %		



Perubahan Rencana Kerja
Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2024

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
						Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %			
5.02.02.2.02						Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		376,596			366,137		73,321		172,329		-		-		245,651		245,651			65.23%		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen	1 dokumen		2 dokumen		-		-		2 dokumen		6 dokumen		150.00 %				



Perubahan Rencana Kerja
Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2024

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
							Transfer Lainnya																						
5.02.02.2.02.0005						Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		376,596				366.137		73.321			172.329		-		-		245.651		245.651		65,23%		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	N/A		N/A		4 Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen		-		-		2 Dokumen		2 Dokumen		N/A				



Perubahan Rencana Kerja
Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2024

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
5.02.04				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		37,665,666		19,449,692		16,519,434		2,832,155		7,818,876		-		-		10,651,030		30,100,723		79,92%			
					Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	60 %		189.38 %		60 %		174.64 %		195.10 %		-		-		195.10 %		195.10 %		325.17%			
					Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	73 %		67.79 %		69 %		17.94 %		25.19 %		-		-		25.19 %		25.19 %		34.51%			
					Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	85 %		99.83 %		83 %		99.56 %		99.86 %		-		-		99.86 %		99.86 %		117.48%			
5.02.04.2.01				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		37,665,666				16,519,434		2,832,155		7,818,876		-		-		10,651,030		10,651,030		28.28%			



Perubahan Rencana Kerja
Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2024

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		6 Dokumen		-		-		6 Dokumen		18 Dokumen		150.00 %			
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		6 Dokumen		-		-		6 Dokumen		18 Dokumen		150.00 %			
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-		-		6 Laporan		18 Laporan		150.00 %			
						Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20615 Objek Pajak		25749 Objek Pajak		19814 Objek Pajak		5474 Objek Pajak		11905 Objek Pajak		-		-		11905 Objek Pajak		37654 Objek Pajak		182.65 %			



Perubahan Rencana Kerja
Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2024

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%					
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Lapora n		4 Laporan		4 Lapo ran		1 Laporan		2 Laporan		-		-		2 Laporan		6 Laporan		150.00 %					
5.02.04.2. 01.0014							Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		697,31 8			310.88 7	66.28 6		142.79 6		-		-		209.08 3		209.08 3		29,98%						
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	N/A		4		4 Lapo ran		1 Laporan		2 Laporan		-		-		2 Laporan		6 Laporan		N/A					
5.02.04.2. 01.0011							Penagihan Pajak Daerah		4,872,3 61			3.078.4 27	469.3 42		1.380.1 34		-		-		1.849.4 77		1.849.4 77		37,96%						
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	N/A		12		12 Doku men		3 Dokumen		6 Dokumen		-		-		6 Dokume n		18 Dokumen		N/A					



Perubahan Rencana Kerja
Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2024

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
							Penagihan Pajak Daerah																						
5.02.04.2.01.0005							Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		17,564,766				6.005.642		1.032.212		2.610.639		-		-		3.642.852		3.642.852		20,74%		
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	N/A		12		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-		-		6 Laporan		18 Laporan		N/A			
5.02.04.2.01.0013							Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		1,397,431				2.486.072		599.697		1.710.527		-		-		2.310.224		2.310.224		165,32%		
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan	N/A		12		12 Dokumen		3 Dokumen		6 Dokumen		-		-		6 Dokumen		18 Dokumen		N/A			

II-12



2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.1.1 Tingkat Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Kegiatan Badan Pendapatan Daerah telah mengacu kepada RKPD 2024 dan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026, dan mempertimbangkan konsistensi rencana kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Adanya pemulihan kondisi ekonomi dampak dari kondisi bencana nasional pandemi COVID-19 serta optimalisasi pencapaian Penerimaan Daerah mengharuskan Badan Pendapatan Daerah melakukan Rancangan kerja yang lebih efektif.

2.1.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi:

- a. Adanya Pandemi Covid Tahun 2019 sehingga muncul berbagai macam kebijakan yang menyebabkan aktivitas ekonomi dan sosial menjadi terganggu yang pada akhirnya berdampak terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah
- b. Kurang akuratnya database objek pajak, terutama PBB yang sebagian besar merupakan database lama warisan dari Kementerian Keuangan sehingga berdampak banyak tunggakan pajak yang tidak bisa tertagih di lapangan
- c. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana dibandingkan dengan Objek Pajak atau Wajib Pajak dan karena dinamikanya memerlukan updating yang terus menerus
- d. Untuk penerapan “tax online” masih banyak kendala di lapangan baik karena kurangnya kesadaran masyarakat maupun keterbatasan pengetahuan teknologi informasi.

2.1.3 Peluang dan Tantangan

Meskipun terdapat tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. namun terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal :

- a. Kerja sama dengan Bank Jatim, Bank Mandiri, dan Bank BNI terkait kemudahan pembayaran.
- b. Adanya pajak online memberikan kemudahan wajib pajak dimanapun berada untuk mendapatkan kemudahan pelayanan.
- c. Pemulihan ekonomi dampak dari Pandemi Covid Tahun 2019 yang mendukung tumbuhnya tempat usaha yang akan memberikan kontribusi terhadap pajak daerah yang signifikan
- d. Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi akan membuat sistem pengelolaan pajak lebih akurat dan transparan

Tantangan :



- a. Pemulihan ekonomi kota membutuhkan biaya sangat besar dan pajak merupakan sumber pendapatan kota utama yang dituntut selalu melakukan inovasi layanan
- b. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menuntut Badan untuk menyesuaikan sistem aplikasi yang didukung anggaran yang memadai untuk menjamin integrasi sistem dengan pihak eksternal yang terkait (lembaga keuangan yang bekerjasama/bank dan wajib pajak) serta demi terwujudnya pelayanan prima pada masyarakat.
- c. Kurangnya transparansi wajib pajak terkait data-data transaksi usahanya
- d. Kurangnya pemahaman wajib pajak terkait peraturan perpajakan

2.1.4 Isu – isu Penting Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa isu strategis yang akan dihadapi Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2024 :

1. Kondisi perekonomian dan isu – isu global yang mudah mempengaruhi naik turunnya penerimaan pajak daerah
2. Pembangunan yang berkembang pesat sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar
3. Masih kurangnya jumlah wajib pajak yang menggunakan aplikasi secara online
4. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak daerah



BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah

Visi Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam RPJMD kota Surabaya Tahun 2021 - 2026 yaitu **“Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan”**, Badan Pendapatan Daerah dalam perannya terhadap pencapaian visi melaksanakan misi ke empat yaitu “Memantapkan Transformasi Birokrasi yang Bersih, Dinamis dan Tangkas Berbasis Digital untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Dalam mewujudkan visi misi Kota Surabaya, maka dirumuskan tujuan Badan Pendapatan Daerah untuk tahun 2024 yaitu Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah dengan indikator Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD dengan target 89,50%.

Sasaran PD merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi satu/beberapa program yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mencapai tujuan diatas, maka sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan indikator Persentase capaian realisasi pendapatan daerah dengan target 100%;
- 2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah dengan target 89,84%

Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 dilaksanakan dalam 3 program meliputi :

- 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program tersebut diwujudkan dalam 10 sub kegiatan.

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2024

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92 %	47,354,427,390	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92 %	50,115,619,783	
	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	37,689,515,360	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	41,033,276,536	
	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	121 Orang/bulan	37,689,515,360	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/bulan	41,033,276,536	
	5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta	2 Dokumen	234,286,014	5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta	2 Dokumen	253,822,986	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			
	5.02.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	234,286,014	5.02.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	253,822,986	
	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %	9,430,626,016	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %	8,828,520,261	
	5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,535,402,852	5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,478,226,717	
	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	5,895,223,164	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	6,350,293,544	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pelayanan Umum Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Pelayanan Umum Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
2	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100 %	366,137,004	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100 %	412,212,409	
	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	4 dokumen	366,137,004	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	4 dokumen	412,212,409	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Transfer Lainnya					Transfer Lainnya			
	5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	366,137,004	5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	412,212,409	
3	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	83 %	16,519,433,756	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	83 %	17,878,350,483	
			Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	69 %				Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	69 %		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	60 %				Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	60 %		
	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	16,519,433,756	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	17,878,350,483	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	12 Laporan				Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	12 Laporan		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah					Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	19.814 Objek Pajak				Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	19.814 Objek Pajak		
	5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	6,005,641,564	5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	6,623,286,766	
	5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	19814 Obyek Pajak	4,638,406,188	5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	19814 Obyek Pajak	4,859,667,147	
	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	12 Dokumen	3,078,426,984	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	12 Dokumen	3,351,611,587	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Penagihan Pajak Daerah					Penagihan Pajak Daerah			
	5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	2,486,072,202	5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	2,711,665,219	
	5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	310,886,818	5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	332,119,764	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2024 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 6 Agustus 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Surabaya



Febrina Kusumawati, S.Si, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 197602112001122001